

**KETERLIBATAN DPR DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN
NEGARA PADA SISTEM PRESIDENSIAL PERSPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh
Zahratul Wahidah Hakim
NIM. 05020421059



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Wahidah Hakim
NIM : 05020421059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Keterlibatan DPR dalam Pembentukan Kementerian Negara
pada Sistem Presidensial Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Juni 2025

Yang menyatakan,



Zahratul Wahidah Hakim

NIM. 05020421059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahratul Wahidah Hakim
NIM. : 05020421059
Judul : Urgensi Keterlibatan DPR dalam Pembentukan
Kementerian Negara pada Sistem Presidensial
Perspektif Siyasah Dusturiyah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahratul Wahidah Hakim

NIM. : 05020421059

Judul : Keterlibatan DPR dalam Pembentukan Kementerian Negara pada Sistem Presidensial Perspektif Siyasa Dusturiyah

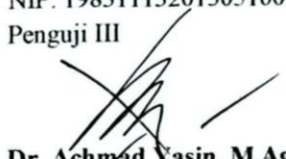
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

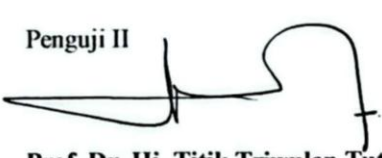
Penguji I


Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji III


Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II


Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji IV


Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 25 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Saqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahratul Wahidah Hakim
NIM : 05020421059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
E-mail address : zahrahakim04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Keterlibatan DPR dalam Pembentukan Kementerian Negara pada Sistem Presidensial
Perspektif Siyasah Dusturiyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2025

Penulis


(Zahratul Wahidah Hakim)

ABSTRAK

Pembentukan kementerian negara pada mulanya berlandaskan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 yang mengatur tentang batasan jumlah kementerian negara secara spesifik merupakan salah satu pasal yang terkena dampak dari perubahan undang-undang tersebut. Batasan jumlah dalam pasal tersebut diubah dengan frasa “sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam pembentukan kementerian negara. Mengingat pembentukan kementerian juga bukan merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga dalam pembentukannya perlu diberikan suatu batasan tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan DPR diperlukan dalam membentuk suatu kementerian teknis (*wizârah tafwîdz*). Sehubungan dengan hal tersebut, skripsi ini hendak menjawab segala permasalahan dengan merumuskan dua pertanyaan sebagai berikut: mengapa DPR perlu dilibatkan dalam pembentukan kementerian negara pada sistem presidensial; serta bagaimana keterlibatan DPR dalam pembentukan kementerian negara pada sistem presidensial di Indonesia jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis atau *historical approach* dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisa bahan hukum secara deskriptif melalui metode interpretasi historis. Interpretasi ini dilakukan dengan cara menafsirkan makna undang-undang melalui sejarah pembentukannya dan sejarah hukumnya.

Hasil dari penelitian ini, penulis simpulkan sebagai berikut: pertama, DPR perlu dilibatkan dalam pembentukan kementerian sebagai representasi dari rakyat serta sebagai tolak ukur kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedua, dalam perspektif *siyasah dusturiyah* kedudukan DPR setara dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang berwenang sebagai lembaga legislasi dan juga dijadikan sebagai tempat *khalifah* meminta masukan dalam berbagai permasalahan. Berkaca dari hal tersebut maka keterlibatan dari DPR sangat diperlukan dalam pembentukan kementerian negara.

Selaras dengan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan untuk: pertama, kepada kepala pemerintahan untuk dapat menggunakan kewenangan ini dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab, dengan melakukan kajian mendalam dan analisis kebutuhan yang komprehensif sebelum memutuskan untuk membentuk suatu kementerian. Kedua, kepada DPR agar dapat berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kementerian negara guna mengetahui apakah kementerian negara pada saat ini telah efektif dan efisien. Sehingga, apabila terdapat suatu kesalahan DPR dapat melibatkan diri guna memberikan suatu batasan dan tolak ukur kesesuaian kebutuhan pemerintahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan	29
BAB II (TINJAUAN UMUM SISTEM PRESIDENSIAL, KELEMBAGAAN NEGARA, DAN SIYASAH DUSTURIYAH).....	32
A. Sistem Presidensial di Indonesia	32
B. Konsep Kelembagaan Negara	38
C. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	41

1. Teori <i>Wizârah</i>	45
2. Teori <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd/ Ahl al-Ikhtiyâr</i>	49
BAB III (KETERLIBATAN DPR DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA)	61
A. Pembentukan Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia.....	61
B. Fungsi dan Peran DPR dalam Pembentukan Kementerian Negara	65
C. Analisis Kelembagaan Negara Terhadap Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	73
D. Tinjauan Historis Pembentukan Kementerian Negara di Indonesia	80
1. Kementerian Negara pada Masa Orde Lama	83
2. Kementerian Negara pada Masa Orde Baru.....	86
3. Kementerian Negara pada Masa Reformasi.....	89
BAB IV (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KETERLIBATAN DPR DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA PADA SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA)	103
A. Analisis Keterlibatan DPR dalam Pembentukan Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial	103
B. Analisis Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Keterlibatan DPR dalam Pembentukan Kementerian Negara pada Sistem Presidensial.....	108
BAB V (PENUTUP).....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Translated by Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Qurthubi, Imam, Ahmad Khatib, and Mukhlis B. Mukti. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Harimurti, Yudi Widagdo. *Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*. I. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Mustofa, Muhammadong, M. Aris Rofiqi, Fauzi, et al. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.

- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rusfiana, Yudi, and Ismail Nurdin. *Dinamika Politik Kontemporer Internasional Dan Lokal Dengan Hambatan Dan Tantangan Dalam Pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta cv, 2017.
- Sinaga, Parbuntian. *Eksistensi Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*. Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023.
- . *Tafsir Al-Mishbah Volume 12*. Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- . *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Adinda, Rizki Aulia, Cici Fatmala, and Yana Syafrie Hijri. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat" *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, no. 1 (2023): 2347–2351.
- Ainul Haq, Muh. Cendekiawan, Mohamad Rifan, and Resa Yuniarsa Hasan. "Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (May 27, 2021): 327.
- Akbarrudin, Adika. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8 (2013).
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): 217–238.
- Arifin, Zainal, Emi Puasa Handayani, and Saivol Virdaus. "Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (April 30, 2020): 10–23.
- Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, and Tomi Mandala Putra Nasution. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (June 20, 2022): 13–19.

- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (June 2021): 153–167.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *Constituto : Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (August 19, 2024): 69–78.
- Gani, Abdul, Shavira Yuniar, Joan David Chrisnando, and Ariana Herawati. "Penerapan Hak Prerogatif Presiden dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia." *Lembaga Penelitian dan Pengembangan Untag* 1, no. 1 (April 8, 2022): 1–10.
- Gusman, Delfina. "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 19, 2024): 655–665.
- Hadi, Dwi Wahyono, and Gayung Kasuma. "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Journal Unair Verleden* 1, no. 1 (2012).
- Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (November 22, 2022).
- Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 18 (October 18, 2001): 1–18.
- Ismail, Hasanuddin. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Kementerian Negara Dalam Kabinet Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.
- Jamil, Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (January 5, 2021): 189–202.
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (April 5, 2021).
- Kelbulan, Jacoba F X, Saartje Sarah Alfons, and Hendry John Piris. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri" 2, no. 7 (2022): 728–738.
- Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (August 1, 2022).

- M. Shofwan Taufiq, Tria Noviantika. "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (February 11, 2021): 1–5.
- Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (December 9, 2022): 169–188.
- Monteza, Fariz. "Urgensi Pembatasan Kewenangan Pada Pengubahan Nomenklatur Kementrian Negar." *Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 93–111.
- Muchlisin, Muchlisin. "Kedudukan Serta Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (December 7, 2020): 124–130.
- Muhakki, Muhakki. "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (October 1, 2011): 135–158.
- Nurhuda, Ahmad, and Yerra Zetira Agesti. "Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (May 31, 2021): 113–123.
- Nurjaman, Andri, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, and Doli Witro. "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid Dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 4, no. 1 (June 20, 2022): 53–74.
- Pondaag, Audi H, Presly Prayogo, and Josua Jeremia Manitik. "Penggabungan Kementerian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Lex Administratum* 10, no. 3 (July 12, 2022): 1–10.
- Rahim, Abd. "Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020. Accessed November 16, 2024. <https://11nq.com/repositoryunhas>.
- Rani, Agung Mahar. "Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 2, no. 2 (2015).
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1

(June 2, 2021): 63–84.

Sucipto, Friska. “Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD Sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2020): 150–158.

Sugiman. “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (August 26, 2020). Accessed April 11, 2025.

Susanto, Mei. “Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara” 5, no. 2 (2016).

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945” 12, no. 2 (2018): 124–128.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

DATA ELEKTRONIK Adinda, Rizki Aulia, Cici Fatmala, and Yana Syafrie Hijri. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat” 5, no. 1 (2023): 2347–2351.

Ainul Haq, Muh. Cendekiawan, Mohamad Rifan, and Resa Yuniarsa Hasan. “Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (May 27, 2021): 327.

Akbarrudin, Adika. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945” 8 (2013).

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Translated by Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Al-Qurthubi, Imam, Ahmad Khatib, and Mukhlis B. Mukti. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): 217–238.
- Arifin, Zainal, Emi Puasa Handayani, and Saivol Virdaus. "Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (April 30, 2020): 10–23.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, and Tomi Mandala Putra Nasution. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (June 20, 2022): 13–19.
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (June 2021): 153–167.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *Constitutio : Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (August 19, 2024): 69–78.
- Gani, Abdul, Shavira Yuniar, Joan David Chrisnando, and Ariana Herawati. "Penerapan Hak Prerogatif Presiden dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia." *Lembaga Penelitian dan Pengembangan Untag* 1, no. 1 (April 8, 2022): 1–10.
- Gusman, Delfina. "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 19, 2024): 655–665.
- Hadi, Dwi Wahyono, and Gayung Kasuma. "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Journal Unair Verleden* 1, no. 1 (2012).
- Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan*

dan Politik Islam 2, no. 1 (November 22, 2022). Accessed January 26, 2025.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2527>.

Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 18 (October 18, 2001): 1–18.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d. Accessed November 13, 2024.
<https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/3/4>.

———. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, n.d. Accessed April 11, 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

———. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, n.d. Accessed January 12, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.

———. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, n.d. Accessed November 14, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008>.

———. *Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, n.d. Accessed November 14, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304396/uu-no-61-tahun-2024>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001.

Ismail, Hasanuddin. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Kementerian Negara Dalam Kabinet Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015. Accessed November 15, 2024.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77627102.pdf>.

Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Jamil, Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (January 5, 2021): 189–202.

Kamma, Hamzah, Mahrída, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Mustofa, Muhammadong, M. Aris Rofiqi, Fauzi, et al. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. Kota Solok, Sumatera Barat: PT

Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (April 5, 2021). Accessed May 5, 2025. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/4346>.

Kelbulan, Jacoba F X, Saartje Sarah Alfons, and Hendry John Piris. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri" 2, no. 7 (2022): 728–738.

Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (August 1, 2022). Accessed March 20, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/42825>.

M. Shofwan Taufiq, Tria Noviantika. "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (February 11, 2021): 1–5.

Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (December 9, 2022): 169–188.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2018.

Monteza, Fariz. "Urgensi Pembatasan Kewenangan Pada Pengubahan Nomenklatur Kementrian Negar." *Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 93–111.

Muchlisin, Muchlisin. "Kedudukan Serta Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (December 7, 2020): 124–130.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhakki, Muhakki. "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi

- Siyasah Dusturiyah)." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (October 1, 2011): 135–158.
- Nurhuda, Ahmad, and Yerra Zetira Agesti. "Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (May 31, 2021): 113–123.
- Nurjaman, Andri, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, and Doli Witro. "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid Dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 4, no. 1 (June 20, 2022): 53–74.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rahim, Abd. "Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020. Accessed November 16, 2024. <https://l1nq.com/repositoryunhas>.
- Rani, Agung Mahar. "Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 2, no. 2 (2015).
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (June 2, 2021): 63–84.
- Rusfiana, Yudi, and Ismail Nurdin. *Dinamika Politik Kontemporer Internasional Dan Lokal Dengan Hambatan Dan Tantangan Dalam Pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta cv, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*. Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023.
- . *Tafsir Al-Mishbah Volume 12*. Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023.
- Sinaga, Parbuntian. *Eksistensi Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2022.
- Sucipto, Friska. "Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD Sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2020): 150–158.
- Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (August 26, 2020). Accessed April 11, 2025.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/468>

Susanto, Mei. "Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara" 5, no. 2 (2016).

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

———. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945" 12, no. 2 (2018): 124–128.

"Kabinet Pemerintahan Indonesia." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Accessed April 24, 2025. <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>.

"Mengungkap Konsep Dan Kriteria Lembaga Negara Dengan 'Constitutional Importance' | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed April 22, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A